

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dalam Administrasi Desa Melalui Program Kerja KKN Pelatihan Administrasi Perangkat Desa di Desa Essang, Talango, Sumenep

Bohri Rahman^{1*}, Maulid Taembo², Mujtahidin Mujtahidin³, Iqlima Thahirah⁴, Muhammad Syaifuddin⁵, Triana Rofika Putri⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Article Info

Article history:

Received 29-06-2024

Accepted 20-12-2024

Published 30-12-2024

Keywords:

Regional government;
Village administration;
Utilization of technology;
Village apparatus

ABSTRACT

The enactment of regional government law number 32 of 2004 has had a major impact on the structure of village government. To run village government effectively, efficient administrative arrangements are crucial. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 47 of 2016 stipulates the framework of village administration, covering general affairs, population, finance, development, and village deliberative bodies. However, the lack of understanding of computer technology in Essang Village, Sumenep Regency prompted the KKN 27 team to hold a village administration training program with a participatory approach. The method used was to conduct participatory training and mentoring for village staff and officials in several activities including counseling and preparation of practical guidebooks. The results of this activity were an increase in the skills of village officials in using computer technology for village governance. Thus, there was efficiency and transparency in village administration in Esang, Talango District, Sumenep Regency.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



*Corresponding Author:

Bohri Rahman

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: bohri.rahman@trunojoyo.ac.id

PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, terjadi perubahan yang substansial dalam struktur dan sistem pemerintahan daerah. Hal ini berdampak luas terhadap pelaksanaan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan penyusunan anggaran untuk mendukung tata kelola pemerintahan di tingkat daerah, terutama di tingkat pemerintahan desa. Untuk mengelola pemerintahan desa secara efektif, perlu dilakukan penataan administrasi yang efisien. Untuk menciptakan keteraturan administrasi di tingkat desa yang dapat berperan sebagai sumber data dan informasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 mengenai administrasi pemerintahan desa. (Dzavina, 2018) Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Dalam proses pelaksanaan

Administrasi Pemerintahan Desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Bab II Pasal (2), dijelaskan proses dan tata aturan penataan administrasi yang ada di desa yang meliputi Administrasi Umum, Administrasi Kependudukan, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, Administrasi Badan Permusyawaratan Desa. (Muhammad Askal Basir, 2020)

Pemerintahan Desa adalah bagian dari sistem pemerintahan nasional yang menjadi dasar bagi pemerintahan pusat dalam mendapatkan data dan informasi untuk merumuskan berbagai kebijakan pemerintahan di tingkat nasional. Kualitas penataan administrasi pemerintahan desa mencerminkan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, semakin optimal penataan administrasi desa, kualitas good governance atau tata kelola pemerintahan desa juga meningkat. (Akhmad Jayadi, 2022) Pengelolaan pemerintahan desa yang baik adalah pemerintahan yang memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan atau kewajaran, serta tetap berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mencapai keteraturan administrasi desa, tata kelola pemerintahan desa harus menjadi penguasaan dan pemahaman bagi para penyelenggara pemerintahan desa. Agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, maka pemerintah desa harus didukung oleh administrasi desa yang benar. Administrasi desa merujuk pada seluruh rangkaian kegiatan pencatatan data dan informasi terkait pelaksanaan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil observasi Tim KKN 27 diketahui selama ini pelaksanaan administrasi di Desa Essang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep belum maksimal. Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman perangkat desa dalam menggunakan komputer, diketahui hanya beberapa orang saja yang memiliki keahlian dalam menggunakan komputer hal ini terjadi karena mayoritas perangkat desa memiliki latar belakang pendidikan hanya hingga tingkat SMA. Mengamati kondisi tersebut, sangat beralasan untuk mahasiswa KKN 27 menjalankan program kerja berupa Pelatihan Administrasi Perangkat Desa Essang. Kegiatan ini diselenggarakan di Balai Desa Essang dengan tujuan memberikan bimbingan dan pembinaan dalam menerapkan tata administrasi desa dengan menggunakan komputer kepada aparatur desa, selain itu juga memberikan pemahaman kepada staf desa mengenai administrasi pemerintahan desa yang efektif dan benar sebagai landasan utama data dan informasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan desa di Desa Essang. Dalam kegiatan ini, ada dua tujuan utama yang ingin dicapai. Pertama, pengembangan keterampilan dalam penggunaan komputer untuk mengelola administrasi di Desa Essang. Kedua, peningkatan kemampuan perangkat Desa Essang dalam menjaga keteraturan administrasi.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan adalah pendekatan *Participatory Learning and Action* (PLA) atau Proses Belajar dan Praktik secara Partisipatif. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Essang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep selama dua hari, pada tanggal 2-3 Januari 2024. Alat yang digunakan adalah peranti computer seperti PC, monitor, laptop, printer, LCD, sofwer/ aplikasi, dan lainnya. Bahan habis pakai yang digunakan adalah book note, pulpen, paket internet, kertas, tinta, dan lain-lain. Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan penggunaan aplikasi/ perangkat lunak dalam pelayanan administrasi desa seperti penggunaan drive, pembuatan surat digital, dan pengiriman atau penerimaan notifikasi permintaan pelayanan dari Masyarakat. Pelatihan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dengan pendampingan praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Bab II Pasal (2), dijelaskan proses dan tata aturan penataan administrasi yang ada di desa yang meliputi: 1) Administrasi Umum, pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum; 2) Administrasi Kependudukan, kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk; 3) Administrasi Keuangan, kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan; 4) Administrasi Pembangunan, kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.

Administrasi memegang peran sentral dalam menjalankan pemerintahan desa karena menjadi penanda kunci dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif. Pengelolaan administrasi di tingkat desa adalah tanggung jawab esensial yang harus dipenuhi oleh desa itu sendiri. (Asmanang, 2020) Dengan memiliki administrasi desa yang terorganisir dengan baik, akan tercipta dasar bagi tata kelola pemerintahan yang efisien, yang dikenal dengan istilah *Good Governance*. Hasil observasi diketahui para aparatur desa essang masih kesulitan dalam mengoperasikan beberapa hal dasar pada perangkat komputer. Oleh karena itu, sebuah program pengabdian telah diselenggarakan untuk memperkuat kemampuan dan keterampilan perangkat desa di Desa Essang. Rincian mengenai tahapan kegiatan Pelatihan Administrasi Perangkat Desa yang dijalankan oleh tim KKN 27 terbagi menjadi tiga bagian.

Tahap pertama yakni survey, yang dilakukan secara kelompok, tujuan dari melakukan survey untuk secara langsung mengamati bagaimana kondisi administrasi desa essang. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan serta metode yang efektif untuk kegiatan pelatihan administrasi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan diketahui bahwa aparatur desa masih belum menguasai pengoperasian perangkat komputer seperti membuat dan menyimpan file word baru, menggunakan microsoft excel, menggunakan printer dan mengatasi trouble pada printer dan lain sebagainya.



Gambar 1. Survey lokasi KKN

Tahap kedua yakni penyampaian materi mengenai administrasi pemerintahan desa dan pengoperasian perangkat komputer. Tim KKN 27 menyajikan informasi mengenai administrasi pemerintahan desa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri No 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. diikuti oleh penyampaian informasi dasar serta tahapan-tahapan dasar dalam menggunakan komputer dan perangkatnya.



Gambar 2. Penyampaian Materi

Tahap ketiga yakni praktik menggunakan komputer dari materi yang telah disampaikan, pada tahap ini aparatur desa dibimbing secara intens. Tim KKN 27 melaksanakan pendampingan yang mencakup pelatihan praktis mengenai penggunaan komputer dan aplikasi perangkat lunak yang relevan untuk keperluan administrasi desa. Selama program pendampingan, aparatur desa didorong untuk mempraktikkan secara langsung penggunaan komputer dalam aktivitas sehari-hari mereka terkait administrasi desa. Mereka diberi kesempatan untuk menggunakan aplikasi perangkat lunak yang relevan.



Gambar 3. Praktik Pemanfaatan Teknologi

Tahap keempat yakni penyusunan buku panduan, penyusunan buku panduan dasar penggunaan komputer ini bertujuan untuk memberikan pendekatan praktis dan berkelanjutan dalam mendukung perangkat desa mengintegrasikan teknologi dalam administrasi desa, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa. Buku yang berjudul “Panduan Dasar Penggunaan Sistem Operasional Komputer/Laptop” merupakan kumpulan dari beberapa panduan seperti halnya panduan membuat dan menyimpan file word baru, panduan melakukan print, panduan sharing printer, panduan membuka file sharing, panduan mengatasi trouble pada printer, panduan menggunakan microsoft excel, panduan merekap beberapa file menjadi satu folder dan lain sebagainya..



Gambar 4. Buku Panduan

KESIMPULAN

Pelatihan, pendampingan, dan penyediaan buku panduan yang diselenggarakan oleh tim KKN 27 merupakan langkah progresif dalam memperbaiki keteraturan administrasi di Desa Essang. Semua ini merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dengan mengintegrasikan teknologi dalam administrasi mereka. Kegiatan tersebut telah memberikan pemahaman dan keterampilan baru pada perangkat desa untuk menggunakan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Kegiatan pelatihan dan pendampingan penggunaan teknologi berdampak pada efektifitas dan efesiensi pelayanan administrasi kepada Masyarakat desa essang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, J. J. P. (2022). Pelatihan aplikasi administrasi perangkat desa sidosari. *Journal of Technology and Social for Community Service*, 85-93.
- Alrasyid, M. H. (2021). Pelatihan pengelolaan administrasi desa. *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 19-23.
- Asmanang, L. O. (2020). Pembinaan administrasi desa di desa wajajaya. *INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian*, 87-94.
- Dzavina, C. (2018). *Buku Cerdas Administrasi Desa*. Yogyakarta: Pixelindo.
- Meili, D. H. K. (2020). Kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan administrasi desa sidomukti. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 36-48.
- Muhammad A. B. (2020). Tata kelola administrasi desa dalam pemanfaatan sistem aplikasi komputer. *HUMANISM*, 57-63.